

KEKUATAN KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sulikanti Agusni*

Abstrak

Koperasi Wanita atau koperasi yang dikelola dan beranggotakan perempuan, telah menunjukkan kemampuannya untuk dapat bersaing dalam memberikan layanan yang baik kepada anggotanya. Namun dalam perkembangannya, jumlah koperasi wanita tidak tumbuh dan berkembang cepat. Padahal koperasi sangat memberi peluang dan kekuatan pada anggotanya yang menyadari sepenuhnya akan perannya. Jika anggota koperasi menyadari peran dan keikutsertaannya, mulai dari perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, niscaya koperasi tersebut akan maju pesat. Kondisi ini oleh Paolo Freire disebut 'consciencious', yaitu keadaan dimana anggota telah memerdekakan cara berpikirnya sehingga mampu berperan dan menentukan jalannya sendiri. 'Kesadaran' inilah yang masih belum banyak dimiliki oleh perempuan dan masyarakat pada umumnya.

*Kata kunci : **Participation**, partisipasi, peranserta; **consciencious**, kesadaran diri, **oppressed**, tertekan, **culture of silence**, budaya pasif, **gender awareness**.*

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi tahun 1998 yang lalu Indonesia telah dibawa kepada perubahan-perubahan yang menimbulkan suatu pendekatan-pendekatan yang sama sekali berbeda dengan pendekatan pembangunan era Orde Baru. Reformasi bertujuan untuk mengembangkan masyarakat madani yang dilakukan melalui pemerintahan yang baik (good governance) dimana pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya dalam mengatur sumber-sumber sosial ekonomi untuk pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan kerjasama serta interaksi yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Salah satu pelaku masyarakat dalam mewujudkan masyarakat madani sebenarnya telah dilakukan oleh koperasi yang dikelola dan beranggotakan perempuan atau dikenal sebagai **koperasi wanita**. Hanya saja keberadaannya masih boleh dikatakan belum optimal dan belum mempengaruhi perilaku masyarakat koperasi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mengapa hal ini dapat terjadi, padahal koperasi telah menjadi salah satu soko guru perekonomian bangsa Indonesia?

Koperasi wanita bukanlah suatu organisasi yang asing bagi kaum perempuan Indonesia. Keberadaannya sudah menjadi bagian dari kehidupan perempuan sejak dari zaman kebangkitan Indonesia di tahun 1930an dipelopori oleh Ibu Hajjah Sofjan, pengrajin batik dari Persatuan Perusahaan Batik Bumiputera di Surakarta. Mereka berkoperasi untuk mengatasi kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membuat batik. Pergerakan perempuan juga berlangsung di Jawa Barat dipelopori oleh Ibu-Ibu Pasundan Isteri (PASI) dengan mendirikan koperasi simpan pinjam di tahun 1933 untuk meringankan

*) Asisten Deputi Urusan Ekonomi Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

beban dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun dalam perkembangannya koperasi wanita cenderung statis dan jumlahnya hingga saat ini diperkirakan tidak lebih dari 10% saja.

Koperasi terbentuk memang atas dasar kebutuhan dan kepentingan yang sama. Bung Hatta selalu menekankan **kepentingan bersama** ini. Oleh sebab itu keberadaan koperasi yang dikelola oleh perempuan pun terjadi karena kepentingan dan keperluan bersama. Contohnya, Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita, Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (KOWAPI), Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) terbentuk karena keperluan yang sama dari para anggotanya, antara lain untuk mendapatkan akses informasi dan kemudahan-kemudahan lain dalam rangka menjalankan usahanya, seluruhnya bergabung dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama.

Koperasi Wanita pada umumnya sangat berpengalaman dalam aktivitas simpan pinjam yang sudah menjadi dasar dari pembentukan koperasi sendiri di kalangan perempuan. Dari sejumlah pendataan yang dilakukan beberapa lembaga diketahui bahwa koperasi wanita umumnya berawal dari kelompok arisan dan kegiatan simpan pinjam di antara anggota arisan. Demikian pula halnya pada koperasi wanita yang terbentuk di lingkungan perempuan pengusaha, terbentuk karena adanya kebutuhan bersama. Hasil kajian dan observasi sebuah lembaga swadaya masyarakat menyatakan bahwa kepentingan utama perempuan berkoperasi adalah aktivitas simpan pinjam dan hasil observasi yang dilakukannya membuktikan bahwa tingkat pengembaliannya mencapai hampir 100%. Harian Pikiran Rakyat, 20 Januari 2004 mengetengahkan Koperasi Simpan Pinjam Budi Karya Wanita yang tidak berbadan hukum, tapi anggotanya mencapai 880 orang dengan 500 anggota aktif meminjam. Koperasi ini telah berusia 30 tahun dan terus berkembang, dengan permodalan di atas Rp200 juta lebih. Contoh lain yang tidak asing lagi adalah Koperasi Setia Bhakti Wanita yang menggunakan sistem tanggung renteng untuk melayani anggotanya yang berjumlah 358 kelompok dengan aset mencapai Rp.7 milyar, dan tunggakannya 0%. Ini hanya gambaran bahwa perempuan dapat berperan dan dapat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keikutsertaan perempuan dalam berkoperasi sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Namun keikutsertaan perempuan belum berarti perempuan berperanserta (*participation*) atau ikut mengambil keputusan, karena diperkirakan hingga saat ini tidak lebih dari 12% saja perempuan yang menjadi anggota koperasi. Jika dibandingkan dengan keikutsertaan perempuan hanya 3% seperti tercatat dalam buku Bung Hatta pada tahun 1957, maka kemajuan keikutsertaan perempuan dalam koperasi sangatlah lamban.

Keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan banyak koperasi wanita sebenarnya dapat mendorong kemajuan perekonomian secara menyeluruh. Namun kembali kepada pertanyaan di atas, mengapa tidak terjadi kemajuan-kemajuan yang nyata atas segala upaya yang dilakukan perempuan-perempuan sejak tahun 1930an? Sebenarnya apakah yang terjadi sehingga koperasi wanita tampaknya tidak berkembang dari tahun ke tahun?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dilihat terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi perempuan dan koperasi wanita itu sendiri. Namun dalam hal lambatnya kemajuan koperasi wanita sangat erat kaitannya

dengan pemahaman perempuan sendiri dalam keikutsertaan dan peransertanya dalam berkoperasi.

II. PEREMPUAN DAN PERMASALAHANNYA

Penelitian yang dilakukan penulis sejak tahun 1988 tentang *participation* atau peranserta perempuan di koperasi memang menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak sepenuhnya berperan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mempengaruhi perempuan itu sendiri, pertama menyangkut pengaruh dalam diri perempuan itu sendiri dan kedua menyangkut pengaruh luar dan lingkungan dimana perempuan itu berada. Namun ada satu kondisi yang nyata, bahwa koperasi wanita dan peranserta perempuan dalam koperasi mengindikasikan kemampuan mereka untuk memperbaiki kualitas hidup dan pembangunan di pedesaan.

Pada penelitian lain tentang peranserta perempuan dalam koperasi, diketahui bahwa pada perempuan yang menyadari posisinya dalam koperasi dan berperanserta aktif - artinya paham sebagai anggota dapat mengemukakan pendapat, ikut merencanakan dan melaksanakan perencanaan yang telah disepakati bersama - perempuan ini menjadi lebih aktif dan mandiri. Hal ini akan menjadi lebih positif jika perempuan tersebut menjadi anggota koperasi wanita. Peranserta perempuan pada koperasi dimana anggotanya laki-laki dan perempuan, perempuan tidak selalu menunjukkan potensi dan kemampuannya, bahkan cenderung mengarah kepada ketergantungan kepada pimpinan.

Rendahnya peranserta perempuan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dilihat dari rendahnya kualitas hidup perempuan Indonesia. Berdasarkan data statistik permasalahan perempuan mencakup rata-rata pendidikan yang lebih rendah dari pada laki-laki, tingkat kesehatan yang masih rendah dengan angka kematian ibu yang masih tinggi (307 per 100.000 kelahiran), angka partisipasi kerja yang masih lebih rendah daripada angka kerja laki-laki, keterwakilan perempuan yang masih rendah di parlemen (11,9% saja), belum lagi dari aspek sosial budaya dan lingkungan yang juga kurang mendorong peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu kualitas hidup perempuan harus ditingkatkan agar terjadi kesetaraan dan keadilan gender.

Dapat dimengerti dengan rendahnya kualitas hidup, misalnya dengan besarnya tingkat buta aksara pada perempuan, maka semakin sempit kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula halnya dengan rendahnya tingkat kesehatan perempuan, maka semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, maka akan semakin kecil kesempatan mereka untuk menikmati hasil sesuai dengan yang diinginkannya.

Dari permasalahan yang paling utama dan perlu diperhatikan menurut penulis adalah rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing bahwa salah satu permasalahan kritis masyarakat internasional dan sipil adalah adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagi kekuasaan dan peran pengambilan keputusan di semua tingkat. Dalam tujuan dan sasaran strategisnya, disebutkan bahwa peranserta perempuan dalam pengambilan

keputusan sangat penting. Pengambilan keputusan ini berarti wibawa, pencapaian tujuan-tujuan persamaan, pembangunan dan perdamaian. Diakui dalam Deklarasi tersebut bahwa perempuan telah menunjukkan kepemimpinannya yang sangat berarti, tapi adanya stereotipe menyebabkan pengambilan keputusan politik tetap dilakukan oleh laki-laki. Perempuan pun secara tradisional memiliki keterbatasan sehingga dalam pengambilan keputusan sering kali tidak diikutsertakan. Koperasi apalagi koperasi wanita membuka peluang untuk ikut berparteserta dalam pengambilan keputusan.

III. KOPERASI, BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Koperasi menurut Undang Undang nomor 25 Tahun 1992 adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dalam jati diri koperasi dikenal adanya nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Hampir semua nilai-nilai ini dimiliki oleh perempuan. Permasalahannya sadarkah perempuan akan potensi yang dimilikinya itu?

Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ada empat kelompok perempuan yang perlu menjadi perhatian yaitu (1) kelompok perempuan yang sama sekali tidak mampu dan tidak memiliki sumber-sumber karena beban kemiskinan; (2) perempuan yang memiliki sumber-sumber tetapi belum/tidak berusaha untuk meningkatkan dirinya; (3) perempuan yang telah melakukan usaha namun tidak memiliki sumber-sumber; dan (4) perempuan yang telah memiliki kemampuan dan peran serta mampu memanfaatkan sumber-sumber. Kelompok yang terakhir merupakan kelompok yang sudah berdaya dan mungkin sudah terbuka pikirannya dan merdeka. Proses pemberdayaan diri pada perempuan akan menjadi lebih cepat jika perempuan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan koperasi merupakan salah satu wadah yang mengakomodasikan terjadinya proses ini.

Dalam berbagai pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, ternyata suara perempuan terdengar melalui koperasi atau organisasi lokal lain. Hal ini mungkin terjadi karena koperasi adalah suatu organisasi yang memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk ikut berproses dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Perempuan jika menjadi anggota aktif dalam koperasi, apalagi dalam koperasi wanita, akan ikut dalam proses ini dan secara alami akan meningkatkan kemampuannya untuk berpikir kritis dan membuka kesadarannya untuk mengikuti semua proses berorganisasi. Pada kondisi inilah, dimana perempuan sadar dan terbuka pikirannya dan merdeka, maka ia akan berperan aktif, ikut serta dalam membangun organisasi koperasinya dan dapat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan wilayahnya. Tapi masih banyak perempuan yang belum paham bahwa di sini ia dapat memberdayakan dirinya dan orang lain.

Paolo Freire (1972 dan 1993) seorang pendidik dari Brazil yang sangat memahami pembelajaran bagi orang dewasa, baik yang dapat membaca maupun yang buta aksara. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki pengetahuan. Pada kelompok masyarakat terpencil yang tidak sekolah misalnya,

melalui proses peningkatan kesadaran dan penemuan-penemuan di sekitar lingkungannya, seseorang belajar, sadar dan menjadi percaya diri. Melalui proses penemuan-penemuan yang kompleks dan terstruktur, maka seseorang semakin meningkat kesadarannya dan berpikir terbuka (*conscientious*). Ia akan menjadi semakin kritis dalam melihat dan memahami situasi sekitar. Pada masyarakat yang sejak kecil telah secara terstruktur mendapatkan pembelajaran dan kondisi tertentu, maka perkembangan pikiran orang tersebut menjadi 'tertekan' (*oppressed*) dan kesadaran yang dapat berkembang secara alami tertahan, menjadi suatu kondisi pasif (*culture of silence*). Orang ini cenderung menunggu masukan apa yang dia peroleh dan tidak ingin untuk berpikir lebih lanjut serta mencari solusi. Ia baru bisa berkembang setelah alam pikirannya terbebaskan.

Kondisi seperti yang dikatakan Paolo Freire sangat relevan dengan kondisi perempuan bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada perempuan yang lebih banyak mengalami tekanan-tekanan budaya sejak kecil, maka besar kemungkinan perempuan terbiasa dalam '*culture of silence*', tidak biasa mengemukakan pendapatnya. Hal ini terbukti pada penelitian yang telah dilakukan pada anggota kelompok perempuan yang tidak pernah mendapatkan pencerahan untuk melepaskan diri dari kondisi pasif dibandingkan dengan anggota kelompok yang telah memperoleh pencerahan. Pada penelitian kelompok perempuan pra koperasi di Jawa Barat dan Sumatera Barat, mereka yang telah memperoleh pelatihan bagi anggota koperasi untuk memahami *participation*, yaitu keikutsertaan dalam proses perencanaan secara menyeluruh hingga pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, perempuan anggota kelompok ini berani menentukan sendiri program kerja dan tidak tergantung pada arahan pemerintah setempat yang saat penelitian masih di bawah Orde Baru yang sangat *top-down*. Sedangkan mereka yang belum pernah mendapatkan pelatihan bagi anggota koperasi cenderung mengikuti apa yang ditetapkan dan diarahkan oleh pihak pemerintah yang tentu saja lebih mengarah kepada mobilisasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah dari pada kesadaran mereka untuk berkoperasi yang benar. Pada perempuan yang menjadi anggota koperasi, apalagi koperasi wanita, dan mereka ikut berproses dalam pengambilan keputusan, mereka secara bertahap sadar akan peran dan fungsinya sebagai anggota, maka perempuan-perempuan ini mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan kritis terhadap pertumbuhan koperasinya.

Budaya juga sangat mempengaruhi perilaku perempuan dalam bersikap dan berperan dalam berkoperasi. Paolo Friere (1972) mensimulasi pengaruh konstruksi budaya terhadap perkembangan seseorang dan menunjukkan pengaruh pendidikan yang sangat konstruktif terhadap cara berpikir seseorang. Pada kelompok perempuan di Jawa Barat, perempuan berumur di atas 45 tahun dan yang telah menopause umumnya aktif dalam berorganisasi. Hal ini dapat dimengerti karena pada umur tersebut perempuan tidak lagi disibukkan oleh anak-anaknya. Selain itu adat setempat dimana orang tua wajib dihormati, memberi tempat bagi perempuan untuk ikut berperanserta dalam kegiatan di masyarakat. Pada kelompok perempuan di Sumatera Barat, peran perempuan dalam kelompok sudah menjadi bagian dari tradisi mereka. Namun peranserta perempuan dalam pengambilan keputusan masih terkendala dengan adanya *ninik-mamak* yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan. Budaya ini terbawa dalam aktivitas mereka dan membuatnya bersikap lebih pasif.

Konstruksi budaya inilah yang oleh Paolo Freire yang perlu menjadi perhatian kita semua dan hal ini sejalan dengan permasalahan mendasar tentang pemahaman gender. Gender adalah persepsi seseorang terhadap perempuan dan laki-laki yang terbentuk sejak anak-anak, bukan atas dasar *sex* atau jenis kelaminnya, tetapi terkonstruksi dan bercampur dengan nilai-nilai budaya dan lingkungannya. Sebab itu upaya pengarusutamaan gender ke seluruh lapisan masyarakat, kelompok dan golongan harus terus digalakkan. Perlu disadari kesadaran gender (*gender awareness*) tidak dapat sekaligus dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penyadaran gender perlu waktu untuk terjadinya perubahan pola pikir dan tingkah laku, sehingga diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk mengubah nilai dan kebiasaan masyarakat.

Hasil penelitian IFC-PENSA (2004) bersama IWAPI mengungkapkan bahwa ada masalah kesadaran gender dalam mengakses permodalan. Seorang anggota IWAPI mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan karena pihak eksekutif bank menilai bahwa pinjaman kepada perempuan pengusaha hanya akan meningkatkan angka perceraian. Stereotipe pihak bank dirasakan perempuan pengusaha sebagai salah satu kendala sulitnya mengakses permodalan dari bank.

Sensitivitas gender berhubungan juga dengan aspek sosial dan lingkungan. Kondisi sosial perempuan harus dilihat juga dari segi kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, lingkungan yang mempengaruhi kehidupan perempuan, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja usaha perempuan. Pemerintah sendiri sering kali kurang memperhatikan aspek gender ini sehingga apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah menjadi sering kurang bermakna dan tidak tepat sasaran.

IV. PEMERINTAH DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemerintah telah banyak melakukan pembinaan kepada perempuan di bidang perkoperasian (dahulu dikenal dengan nama P2W bidang Perkoperasian) sejak tahun 1979. Pembinaan umumnya berupa pelatihan dan penyuluhan tentang perkoperasian kepada kelompok-kelompok perempuan, yang merupakan bagian program terintegrasi lintas sektoral P2W. Lebih dari 3000 orang, terdiri dari anggota koperasi wanita, motivator wanita untuk kelompok ekonomi produktif, tenaga kerja wanita perusahaan, pedagang kecil eceran dan kader koperasi terlatih, kemudian ditingkatkan dalam bentuk temu usaha antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta pameran untuk membuka peluang usaha bagi wanita pengusaha kecil dan menengah. Namun hasil pembinaan P2W bidang perkoperasian masih dinilai belum mampu meningkatkan peranserta perempuan dalam perkoperasian, walaupun jumlah koperasi wanita telah menunjukkan peningkatan.

Perhatian terhadap koperasi wanita surut bahkan pada tahun 1990an seiring dengan perubahan paradigma pembangunan. Hasil evaluasi dan penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi (1995) menunjukkan masih kurangnya partisipasi anggota perempuan dalam perkoperasian. Program P2W bidang perkoperasian dinilai kurang efektif disebabkan dalam program lintas sektoral, perkoperasian diletakkan pada gerbong akhir dari serentetan pembinaan P2W. Ditambah pula program diberikan kepada kelompok-

kelompok hanya selama satu tahun anggaran. Dalam evaluasi terbukti bahwa kelompok-kelompok wanita peserta P2W tersebut belum menguasai penuh sektor perkoperasian. Secara umum, pihak BAPPENAS juga menilai bahwa proyek-proyek P2W masih sangat terbatas dan kecil pengaruhnya terhadap pembangunan.

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari perkembangan dunia. Seperti kita ketahui bersama, perhatian dunia terhadap perempuan sudah dimulai sejak 1946 dengan didirikannya Komisi tentang Status Perempuan yang kemudian dikukuhkan lebih lanjut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Hak-hak Manusia Dunia tahun 1948. Kemudian tahun 1975 dinyatakan sebagai Tahun Perempuan Internasional dan Konferensi Dunia tentang Perempuan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Mexico City. Selanjutnya tahun 1976 hingga 1985 dinyatakan sebagai Tahun Dekade PBB untuk Perempuan. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan disepakati pada tahun 1979. Pada tahun 1985 dilakukan Konferensi Rencana Aksi Internasional untuk Meningkatkan Status Perempuan pada tahun 2000. Kemudian diikuti dengan Konferensi Perempuan Dunia di Beijing tahun 1995 yang menghasilkan Kesepakatan Dasar-Dasar Rencana Aksi yang harus dilaksanakan oleh setiap negara. Selanjutnya setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diminta untuk melaporkan hasil upaya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Bagi Indonesia, upaya pemerintah dalam memajukan status, peran perempuan dalam pembangunan serta kualitas hidup perempuan tidak terlepas dari perkembangan ini. Program P2W yang dilaksanakan antara tahun 1978 hingga tahun 1992 menggunakan pendekatan *Women in Development* (WID) yang memfokuskan program pembangunan khusus kepada perempuan. Perempuan menjadi kelompok target dalam peran produktifnya dan lebih sering menjadi objek daripada subjek. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Kemudian Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Kemudian dalam Pelita VI pemerintah mencanangkan pendekatan *Gender and Development* (GAD) yang memfokuskan program pembangunan tidak khusus bagi perempuan, tetapi juga melihat kepada hubungan peran antar perempuan dan laki-laki. Dari pendekatan GAD diharapkan agar keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan menjadi lebih setara dan memberikan akses, kontrol dan manfaat kepada pelaku pembangunan itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan rencana aksi yang telah disepakati bersama dalam Konferensi Perempuan Dunia dan setiap tahunnya Indonesia melaporkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Oleh sebab itu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan selalu melakukan koordinasi melalui pertemuan lintas sektoral mengisyaratkan perlunya peningkatan kualitas hidup perempuan di semua sektor. Perkembangan di bidang ekonomi dilihat dari sisi kepentingan perempuan juga senantiasa diikuti dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perkembangan peranserta perempuan di perkoperasian juga menjadi perhatian pemerintah. Dari pertemuan lintas sektor, diketahui bahwa upaya pemberdayaan lebih ditujukan kepada kelembagaan dan bukan kepada

individunya. Penelitian yang dilakukan SMERU (2003) atas kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengindikasikan bahwa telah banyak bantuan pemerintah dan donor yang diberikan, namun ketika dikonfirmasi ke tingkat akar rumput ternyata upaya yang diberikan sangat kecil atau pun tidak sampai. Untuk Koperasi dan Usaha Kecil misalnya, penyediaan permodalan dilakukan melalui pendekatan sentra dimana pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (laki-laki dan perempuan atau masih netral gender) yang ada pada satu wilayah akan mendapatkan pendampingan oleh Lembaga Pengembangan Bisnis/Business Development Services (LPB/BDS) dan didukung dengan modal awal padanan melalui koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP-kop). Upaya ini tentu saja sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena pendanaan yang juga terbatas. Akibatnya para pengusaha, apa lagi perempuan pengusaha tidak mudah mendapatkan akses permodalan dengan bunga dan persyaratan yang dapat mereka penuhi.

Untuk periode Kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sejak 2004 lebih ditekankan melalui satu kebijakan yaitu Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Melalui kebijakan ini diharapkan instansi terkait berikut semua jajaran masyarakat madani berkoordinasi, bersinergi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan perempuan. Beruntung rupanya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap peran perempuan di bidang ekonomi mulai dipahami dan akses pendanaan bagi perempuan pengusaha mulai diperhatikan, walaupun mungkin belum sepenuhnya paham tentang gender. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sejak tahun 2006 telah meluncurkan program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) yang menyalurkan dana kepada koperasi wanita agar perempuan pengusaha skala mikro dan kecil baik secara kelompok atau pun perorangan dapat mengakses pendanaan untuk modal usaha.

Hasil pertemuan dengan lintas sektoral dan stakeholder lainnya menunjukkan kurangnya koordinasi atau tidak adanya pengembangan informasi dan jaringan di antara kelompok-kelompok perempuan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral mau pun kelompok-kelompok perempuan yang tumbuh dari bawah, sehingga perlu dilakukan advokasi, pendampingan ataupun fasilitasi terhadap penataan kelembagaan dan jaringan. Adanya berbagai kelembagaan yang dikelola perempuan seperti Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) tampaknya lebih berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan dan bukan untuk keperluan kegiatan ekonomi. Sedangkan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang benar-benar merupakan organisasi yang berkecimpung langsung dalam kegiatan ekonomi, dengan keadaannya yang masih serba terbatas, belum sepenuhnya dapat melakukan koordinasi dengan anggota-anggota di seluruh Indonesia.

V. KOPERASI WANITA PELUANG DAN KEKUATAN BAGI PEREMPUAN

Kekuatan yang ada pada koperasi wanita seperti yang telah diungkapkan di atas menunjukkan bahwa koperasi memberikan peluang yang besar bagi perempuan yang menjadi anggota koperasi, terutama dalam proses penyadaran diri, membuka cara berpikir yang lebih lepas dan terbuka, sehingga

ia menjadi sosok perempuan yang percaya diri, memahami perannya dan dapat mengambil keputusan (*consciencious*). Pemahaman gender akan menambah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang telah terkonstruksi oleh lingkungannya dan budaya setempat, sehingga dalam pengambilan keputusan orang tersebut sensitif terhadap kondisi dan kebutuhan setempat.

Koperasi memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan dan menyumbangkan potensi yang dimilikinya bagi kemajuan bersama. Dengan cara berpikir yang terbuka diikuti dengan aspek jati diri koperasi yang demokratis, perempuan akan lebih mampu melaksanakan aktivitas dan kegiatannya. Koperasi wanita pada umumnya berawal dari bentuk arisan yang menjadi dasar kemampuan koperasi itu untuk mengembangkan usaha simpan pinjam menjadi lebih efektif. Tingkat kehati-hatian kaum perempuan dalam mengelola uang (yang bukan miliknya) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan.

Koperasi memberikan perlindungan hukum dan koperasi wanita memberikan peluang untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak pemberi dana, dalam hal ini pihak perbankan. Selama ini perbankan memang amat sangat netral gender. Perbankan tidak melihat bahwa yang datang ke bank adalah manusia, laki-laki dan perempuan. Perbankan melihat yang datang adalah sebuah korporasi dengan jaminannya dan bukan orang per orang. Penilaian didasarkan pada standar-standar tertentu (5C) yang sering kali menyisihkan sisi-sisi kualitatif manusia yang positif. Namun akhir-akhir ini, dorongan internasional untuk pemahaman dan sensitif gender semakin gencar. Perbankan harus mulai menimbang dan menilai untung rugi menggunakan koperasi wanita sebagai lembaga penyalur kredit mikro bagi para pengusaha mikro. Pemerintah sendiri telah memulainya dengan program PERKASSA.

Bagi perempuan Indonesia, pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan dasar apalagi dengan semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun ke tahun. Pengalaman dan pemahaman perempuan dengan arisan dapat membantu perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian bangsa, dalam hal ini melalui perannya dalam memberikan akses pendanaan melalui koperasi kepada usaha mikro. Dalam berkoperasi, perempuan faham betul maksud untuk menyimpan, menabung, meminjam dan memanfaatkan uang yang tersedia. Perempuan sebetulnya merupakan manajer yang baik dalam usaha (ADB, 2002). Di samping itu, pemberian kesempatan atas hak ekonomi perempuan akan mengantarkan kaum perempuan pada suatu tatanan perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Perannya dalam peningkatan produktivitas ekonomi perempuan selain meningkatkan rasa percaya diri sebagai aktor pembangunan, tetapi juga memberikan posisi tawar bagi perempuan terhadap rekan sekerja laki-laki.

Tingkat kehati-hatian dalam pengelolaan uang orang lain telah menjadi bagian kehidupan dari banyak perempuan. Walaupun seringkali perempuan pengusaha harus berjuang lebih berat dari pada laki-laki pengusaha, perempuan biasanya lebih tangguh untuk menghadapi berbagai kendala. Dalam bentuk koperasi wanita, perempuan dapat melakukan pengaturan dan pengelolaan dana masyarakat semaksimal mungkin bagi kepentingan anggotanya. Koperasi wanita telah terbukti dapat bersaing dengan koperasi simpan pinjam lainnya.

Akhirnya dapat disimpulkan koperasi memberi peluang kepada perempuan yang menjadi anggota koperasi untuk ikut dalam seluruh proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, sehingga perempuan dapat berproses membangun kesadarannya untuk menjadi *consciencious*. Perempuan anggota koperasi yang telah menyadari perannya akan mampu menentukan dan membangun koperasinya lebih baik lagi. Kapasitas dan kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan memberi kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk mau melihat dan menilai tingkat partisipasi perempuan dalam berkoperasi, bukan hanya korporasi, seperti yang dilakukan oleh perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edeng Abdurahman, (2000). '*Gender Mainstreaming*' dalam *Perencanaan Pembangunan*, makalah disampaikan pada Semiloka Penyadaran Jender bagi Perencana/Pengambil Keputusan di lingkungan Kantor Menteri Negara Koperasi dan PKM. Jakarta, 29 Pebruari 2000.
- IFC-PENSA, (2004). *Suara-Suara Perempuan Pengusaha*. Jakarta
- Kaye Murray, (1995). *For The Love of Peace: Women and Global Peace Building*. El Faro, Sydney.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, (1996). *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa Berwawasan Kemitrasejajaran yang Harmonis antara Pria dan Wanita dengan Pendekatan Jender*. Jakarta
- Kementerian Koperasi dan UKM, (2002). *Laporan Hasil Pemetaan: Sektor Produktif KUKM Yang Berwawasan Gender*. Jakarta.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2004) *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan*, Jakarta.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, (2005). *The BPFA Beijing Platform for Action, Fourth World Conference on Women, held at the United Nations, New York*.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, (2006). *The BPFA-CSW Beijing Platform for Action*, disampaikan pada Koperensi Perempuan Dunia, Perserikatan Bangsa Bangsa. New York. 28 Februari – 10 Maret 2006
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, (2006). *Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)*. Jakarta.
- Ministry of Cooperatives, (1986). *Indonesia: Country Report*. Jakarta
- Mohammad Hatta, (1957). *The Co-operative Movement in Indonesia*. New York, Cornell University Press.
- Paolo Freire, (1972). *Cultural Action for Freedom*. Baltimore, Penguin Books Inc.
- Paolo Freire, (1993). *Pedagogy of The Oppressed*. England, Penguin Books
- Sita van Bemmelen, (1995). *Jender dan Pembangunan: Apakah yang Baru? Dalam T.O Ihromi (penyunting), Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta.
- SMERU (2003) *Upaya-Upaya Penguatan Usaha Mikro di Indonesia*, Jakarta.

- Sulikanti Agusni, (1988). *The Role of Women's Cooperatives and Women's Participation for Rural Development in Indonesia*, A Study on Women Participation, Plan B Paper for Master of Science.
- Sulikanti Agusni, *Popular Participation amongst Women's Organisations in West Java: An Experience of participatory and Freire' Approach*, the 29th Annual International Conference, Community Development Society, Athens, Georgia, 27-30 July 1997.
- Sulikanti Agusni, *The Development of Popular Participation: Case Studies Of Women's Organisations In West Sumatra and West Java, Indonesia*, Women's Worlds 99, 7th International Interdisciplinary Congress on Women, Tromsø, Norway, 20 -26 June 1999.
- Sulikanti Agusni, (1999). *Popular Participation an Women's Organisations in Indonesia*, Disertasi Doktor, Curtin University of Technology, Westren Australia.